

## Memperkuat Pengorganisasian Masyarakat Desa

Abdullah Ismail <sup>1✉</sup>

<sup>1</sup> Prodi Sosiologi FISIP, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate, Indonesia.  
e-mail : [abdullahismailx@gmail.com](mailto:abdullahismailx@gmail.com)

Info Artikel :	<input type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input checked="" type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima :	19 Mei 2021, Disetujui : 17 Juni 2022, Publikasi On-Line : 24 Juni 2022		

Vol.	No.
<b>2</b>	<b>1</b>
Hal : 43 - 51	

✉ Koresponden Author :

**Abdullah Ismail**

e-mail :  
[abdullahismailx@gmail.com](mailto:abdullahismailx@gmail.com)  
Universitas  
Muhammadiyah Maluku  
Utara  
Ternate-Indonesia



Copyright©  
Abdullah Ismail

### Abstrak.

*Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing) pada prinsipnya adalah sebuah langkah ikhtiar dalam gerakan pemikiran dan pola kerja yang berupaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Kondisi masyarakat desa saat ini masih mengalami banyak masalah baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan. Melakukan pengorganisasian masyarakat agar masyarakat desa dapat berdaya, mampu dan mandiri (self-help) dalam memecahkan masalah-masalah yang hadapinya secara bersama-sama. Titik tolaknya adalah asumsi yang menyatakan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat desa.*

**Keyword : Pengorganisasian, Masyarakat, Perencanaan**

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam usaha meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan perlu digali cara-cara pengelolaan usaha yang paling sesuai.<sup>1</sup> Misalnya, melalui apa yang disebut "*conscience collective*" akan dapat menahan kekuatan arus individualisme yang menyertai modernisasi, dan semangat gotong royong dapat diberi fungsi-fungsi baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok.

Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organizing*) sesungguhnya adalah sebuah pemikiran dan pola kerja yang telah ada dan berlangsung sejak berabad-abad yang lampau, yang serangkaian upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Sebagai mana terlihat dalam kehidupan di zaman Lao Tse di dataran Cina, sebagai suatu rumusan konsep pemikiran dan pola kerja.<sup>2</sup>

Semangat yang mendasar pilihan atas paradigma Lao Tse tersebut pada dasarnya adalah mengembalikan harkat dan martabat manusia seutuhnya dalam berbagai gagasan dan proses pembangunan, untuk itu strategi dasarnya adalah dengan jalan; *pertama*, menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, baik dalam proses maupun pencapaian hasil pembangunan. *Kedua*, gagasan suatu pembangunan masyarakat harus mengacu pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan *ketiga*, pembangunan harus bertumpuk pada potensi dan kemampuan masyarakat.

Arti penting pengorganisasian masyarakat, menuju pada satu fase di mana masyarakat berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya berhadapan dengan negara atau kekuasaan sosial yang

<sup>1</sup>Lihat, MC. Candra Rusmala D; *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*, Volume IX, No.2, Yogyakarta, Desember 2008, ISSN: 1411-3821, Hal. 116

<sup>2</sup> Lihat,Ahmad Wajir dan Triyono Darusman; *Catatan Pertama, Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat Disimpul Belajar*, Bogor,cetakan pertama, April 2001, Yayasan Pustaka, hal, 1-3.

dominan, masyarakat menjadi tidak menusiawi karena tidak atau kurang memiliki kekuatan. Kekuatan negara menjadi tidak manusiawi karena kelebihan kekuatan, yang dengan kekuatan itu ia berlaku dominan pada masyarakat.<sup>3</sup> Maka, memungkinkan masyarakat mengorganisir itu diperlukan wahana diri bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya, dan untuk kemudian dapat melindungi kepentingan-kepentingan mereka serta menaikkan posisi tawar mereka dihadapan kekuatan-kekuatan lain, yang lebih dominan kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan sebagaimana sebagian kecil memiliki aset dan akses untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara dan sebagian besar yang lain tidak bisa menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan, tentu saja pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak tertentu, tetap juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama seperti bagaimana meningkatkan produktifitas, bagaimana meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Paradigma Pengorganisasian Masyarakat

Pendefinisian pengorganisasian masyarakat seperti yang disampaikan oleh Dave Beckwith & Cristina Lopez, 1997 sebagai berikut: "Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemu-kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kepastian untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada".<sup>4</sup>

Jadi, perorganisasian bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif massa kritis, untuk mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Pengorganisasian merupakan usaha untuk membangun kekuatan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain, masyarakat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, independen, dan merdeka (tampa paksaan) dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Harus diakui bahwa pada kebanyakan masyarakat tidak berada dalam kondisi kritis, yang oleh karenanya pengorganisasian memikul beban mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat. Kerja pengorganisasian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, terpadu dan terarah, serta ditujukan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat melalui pembangunan suatu kolektif yang terorganisir.<sup>5</sup>

Pada konteks tersebut, aktifitas pengorganisasian sangat terkait dengan perubahan sosial yang dimuarakan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Agenda perubahan tidak bisa digantungkan kepada niat baik kekuasaan, pasar politik, maupun situasi lain yang tidak pasti. Faktor paling utama yang hendak memastikan bahwa perubahan akan berjalan di atas rel yang benar adalah kekuatan masyarakat yang dipandu oleh kepemimpinan dan garis politik yang memihak masyarakat. Kekuatan masyarakat semacam ini tidak akan begitu saja terjadi, melainkan hasil dari suatu pengorganisasian yang sungguh-sungguh sistematis dan intensif.

Melakukan pengorganisasian masyarakat dengan maksud (memberdayakan) sehingga masyarakat mampu dan mandiri mengenal persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar (usah mengatasi masalah tersebut), berangkat dari asumsi-asumsi dalam kehidupan masyarakat. Yakni, *pertama*, bahwa masyarakat punya kepentingan terhadap perubahan (mengubah tatanan yang timpang menjadi tatanan/struktur baru yang berbasis keadilan), atau untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. *Kedua*, bahwa suatu perubahan tidak pernah datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan kerja keras dan perjuangan untuk mendapatkannya.

<sup>3</sup>Lihat, Syahyuti; 30 konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan pertanian, Penjelasan Tentang "Konsep, Istilah, Teori, dan Indikator Serta Variabel" Jakarta, 2006, PT.Bina Periwara. hal. 93.

<sup>4</sup> Ibid. Ahmad Wajir. Hal 6.

<sup>5</sup>Lihat. Soetomo; Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Yogyakarta, 2011, Pustaka Pelajar. Hal, 103.

*Ketiga*, bahwa setiap usaha perubahan (sosial) pada dasarnya membutuhkan daya tekan tertentu, dalam makna usaha memperkuat (daya tekan) juga memerlukan usaha (perjuangan) yang bersifat sistematis, maka pengorganisasian bukanlah untuk pengorganisasian itu sendiri, melainkan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat. Pemikiran ini bermula pada prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat atau suatu proses dari, oleh dan untuk rakyat. Secara mendasar pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan solidaritas bersama dalam suatu kolektif yang terorganisir, serta disisi lain menyiapkan lapisan sosial baru bagi tatanan lebih baik yang ingin dicapai.

## 2.2. Prinsip-Prinsip Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat, yang banyak terfokus pada lingkungan masyarakat marjinal, bekerja dengan mengajak komunitas atau masyarakat untuk membongkar bungkus alienasi (keterasingan) dan marginalisasi (penyisiran) dengan jalan memerdekakan, melepaskan diri dari proses pembodohan dan pemiskinan yang suda terjadi secara sistematis dan terstruktur<sup>6</sup>.

Jadi, sebuah proses pengorganisasian masyarakat yang benar harus mampu memberikan pencerahan dan penyadaran kepada komunitas bahwa kehidupan adalah milik bersama. Pengorganisasian masyarakat juga harus dapat mengingatkan orang terhadap kecenderungan konsumtif, selalu mencari kemudahan dan pragmatis. Sehingga tidak lagi memiliki daya kreasi dan kemandirian dalam menjalani dan mensikapi kehidupan ini.

Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasian masyarakat, dan atau kelompok pengorganisasian masyarakat sebagaimana dijelaskan penulis berikut ini: *Pertama*, membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat. *Kedua*, bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan. *Ketiga*, membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut. *Keempat*, tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan "tetua" dari komunitas tersebut. Dan *kelima*, mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

Kelima prinsip pengorganisasian tersebut dirumuskan oleh penulis dari satu gagasan/ajaran Lao Tse (700 SM) seperti penjelasannya berikut ini:

"datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlh dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu; bangunlah dari apa yang mereka punya; tetapi pendamping yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, "kami sendirilah yang mengerjakannya".<sup>7</sup>

Gagasan Lao Tse tersebut, merupakan bentuk dari prinsip pengorganisasian masyarakat, yang mana seorang atau kelompok pengorganisasian harus memulai dari realitas masyarakat dimana kehidupan masyarakat tidak bisa dirubah dengan maunya negara dan jika pengorganisasia mau merubah masyarakat juga tidak semata-merta merubah atau mengatur masyarakat begitu saja. Namun, harus dipelajari kehidupannya dan kemudian dilihat mana yang dianggap untuk diperbaharui maka penting untuk diperbaharu, demi menuju pada cita-cita bersama masyarakat yang bermartabat. Dalam prinsip pengorganisasian masyarakat tentunya membutuhkan model-model pengorganisasian, seperti yang akan dijelaskan oleh penulis di bawah ini.

## 2.3. Model-Model Pengorganisasian

Bagian ini akan menjelaskan tentang model pengorganisasian yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang akan melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat desa. Maka dari itu titik tolak untuk melakukan pembahasan terhadap masyarakat desa bisa dilakukan dengan beranjak dari beberapa sisi-sisi pengamatan dan pemahaman, seperti dari sisi stratifikasi (pelapisan) masyarakat, sisi pengelompokan masyarakat, sisi ras dan etnis, sisi geografi, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam konteks memahami model dan strategi pengorganisasian masyarakat maka fokus pembahasan hanya dari sisi karakter dan mobilitas masyarakat, yakni dari sisi masyarakat perkotaan

<sup>6</sup>Lihat, Nurulitha Andini; *Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum Kabupaten Sleman*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.24 No.3, Desember 2013, Hal. 179.

<sup>7</sup> Op.Cit, Ahmad Wajir. Hal 7

<sup>8</sup>Lihat. Krisdyatmiko; *Belajar Bersama Dengan Masyarakat Desa, Pengembangan Kelembagaan Jurusan Ilmu Sosiatri Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Petani*. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, desember 2004. Hal, 77.

(industri) yang maju dan sisi masyarakat pedesaan (agraria) yang tradisional. Maka dalam pembahasan model pengorganisasian tersebut penulis menggunakan dua tokoh dalam melakukan analisis model pengorganisasian masyarakat yakni Paulo Freire dan Saul Alinsky sebagai kekuatan untuk melihat atau membentuk model pengorganisasian.

**2.3.1. Strategi dan model Paulo Freire**

Strategi pengorganisasian masyarakat dan modelnya telah dilakukan oleh Paulo Freire dalam melakukan pengorganisasian masyarakat tradisional (pedesaan). Salah satu ciri masyarakat tradisional adalah lebih mementingkan keharmonisan hubungan dengan alam. Sehingga wajar apabila mereka menjadi terdidik dan terlatih untuk bisa berpikir positif terhadap berbagai fenomena dan pengalaman hidup, dan secara sosial punya kecenderungan kuat untuk tunduk dan patuh kepada orang atau pihak yang mereka anggap berlebih termasuk kepada penguasa.

Karena hormatnya terhadap penguasa, mereka menjadi kurang peka terhadap gejala-gejala kehidupan di luar yang sangat dinamis dan tidak jarang disertai dengan kelicikan-kelicikan. Sehingga sering kali mereka menjadi obyek penyalagunaan kekuasaan tanpa mereka sadari kerugiannya. Dalam menghadapi masyarakat tradisional Freire menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan pendidikan yang dialogis,<sup>9</sup> yang bertujuan membangun pemahaman baru namun masih dalam konteks setempat. Sehingga kelak bisa dihasilkan isi dan bentuk ekspresi budaya baru sebagai instrumen penting dalam mencapai kemajuan hidup.

Dari berbagai pengalaman kasus, masalah yang dialami masyarakat tradisional sudah hampir mencapai klimas, dalam arti penderitaan mereka sudah terendapkan, tertumpuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun mereka belum terlalu merasakannya atau kalaupun sudah dirasakannya, sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana cara dan dari mana mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti digambarkan oleh Freire dalam skemanya (Gambar1).



**Gambar 1.** Alur Praksis Model dan Strategi Paulo Freire

Dari skema (Gambar 1), telah menunjukkan bahwa jika pelaksanaan metode dan strategi pengorganisasian harus dilalui dengan melihat kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Strategi utama yang digunakan untuk mencapai penyelesaian masalah, maka dimulai dengan proses pembelajaran penyadaran dan pengenalan masalah yang terjadi terlebih dahulu.

Strategi ini dapat dijadikan sebagai pondasi bagi penentuan aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masyarakat sadar akan permasalahan yang dihadapi dan memutuskan untuk melakukan penyelesaian, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengenalan potensi dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi penyelesaian masalah tersebut, baik yang suda dimiliki oleh komunitas ataupun yang belum.

**2.3.2. Strategi dan model Saul Alinsky**

Saul Alinsky telah dikenal dengan pengalamannya sebagai seorang pengorganisasian terhadap masyarakat perkotaan yang model dan strateginya dipenuhi dengan aksi-aksi<sup>10</sup> yang bersifat konfrontasi konflik. Pilihan aksi tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial komunitas dimana Saul

<sup>9</sup> Lihat, Paulo Freire. *Pendidikan Sebagai Proses. Surat Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea-bissau*. Terjemahan Indonesia. 2000, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 54.

<sup>10</sup> Istilah Aksi yang dimaksudkan merupakan bentuk gerakan yang dilakukan oleh setiap komunitas atau masyarakat yang sifatnya mendorong untuk merubah tatan masyarakat itu sendiri.

Alinsky bekerja, yakni para buru industri, penduduk perkampungan padat, serta mereka yang tersingkir dari akses atas fasilitas kehidupan yang layak dan manusiawi.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau komunitas perkotaan biasanya demikian jelas dan eksplisit yang umumnya berujung pada ketidakadilan. Sehingga, tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh komunitas ini lebih bersifat nyata, seperti misalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan serta menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Maka dari itu, strategi yang ditawarkan oleh Saul Alinsky adalah mengajak anggota komunitas untuk membangun organisasi komunitas (organisasi rakyat) yang kuat dan mampu menjalankan aksi-aksi umum (*public action*),<sup>11</sup> termasuk dalam melakukan konfrontasi terhadap pelaku penindasan. Bahkan kalau memang dibutuhkan, organisasi komunitasnya/masyarakat ini bisa mengambil peran langsung dalam pekerjaan-pekerjaan politik, seperti terlibat dalam kepentingan pemilihan umum, menjadi pendukung calon partai tertentu dalam suatu pemilihan. Semua ini tentu didasari oleh pemikiran bahwa kerja politik tersebut suatu saat bisa menghasilkan penyelesaian atas masalah ketidakadilan yang terjadi.

Untuk mencapai bangunan organisasi komunitas atau masyarakat yang kuat, sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka setiap kali aksi harus selalu diikuti dengan proses perenungan atau refleksi untuk mencari kelemahan-kelemahan bersama dan memperoleh temuan-temuan berharga, sehingga aksi selanjutnya bisa lebih sempurna dan efektif dibandingkan sebelumnya.

#### 2.4. Relefansi Pengorganisasian Masyarakat Desa

Pada penjelasan sebelumnya tentang strategi dan metode pengorganisasian masyarakat telah digunakan dua tokoh penting yang masing-masing melakukan model dan strategi pengorganisasian masyarakat, pada substansinya sama yakni pengorganisasian masyarakat itu sendiri. Namun pada studi yang berbeda, Paulo Freire pada masyarakat pedesaan, sedangkan Saul Alinsky pada masyarakat perkotaan. Dua objek yang berbeda namun, pada konteks semangat pengorganisasian masyarakat tentunya hampir sama dalam metode dan strategi yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Maka dari itu bagian ini akan menjelaskan tentang relefansi pengorganisasian yang harus dilakukan.

Dalam analisa sosial digambarkan adanya tiga kekuatan besar dalam proses kehidupan kemasyarakatan, yakni Negara, Modal dan Rakyat. Dimana kekuatan<sup>12</sup> dari ketiga aktor besar tersebut tidak seimbang terjadi pengumpulan dan penumpukan kekuatan hanya pada negara dan modal saja. Sementara rakyat selalu dalam kondisi “apa adanya”.

Pertemuan kekuatan antara negara dan modal bermuara pada terciptanya kompromi yang menghasilkan pengaturan-pengaturan baru dalam pemanfaatan berbagai fasilitas kehidupan, seperti pengelolaan sumberdaya manusia, membangun perawatan terhadap lingkungan, kesadaran bersama dalam menuju peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi kecil dan menengah, dan penguasaan lahan dan lain-lain. Hal tersebut terjadi hanya mengutamakan kepentingan negara dan modal saja. Sementara rakyat terpinggirkan dan hanya menjadi korban dari ketimpangan perimbangan kekuatan ini.

Pada kondisi yang lebih praktis, demikian jelas terlihat gejala dan peristiwa dimana posisi masyarakat semata-mata hanyalah sebagai “obyek” dari gagasan dan kebijakan yang dibuat oleh kebijakan negara dan modal, baik keduanya bersatu maupun sendiri-sendiri. Praktek-praktek dan pola hubungan tidak seimbang seperti yang dijelaskan diatas, jelas mendatangkan banyak kerugian bagi rakyat, yaitu di samping terjadinya kesenjangan sosial yang parah antara masyarakat dan dua aktor lainnya, juga terjadi proses pembodohan dan pemiskinan secara struktural.

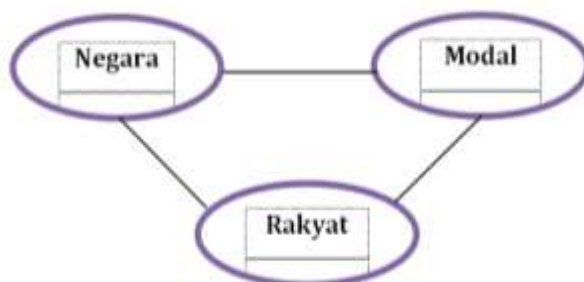
Lebih lanjut, analisa sosial juga menghasilkan asumsi bahwa negara dan modal adalah sebuah kesatuan komunitas, kesatuan kepentingan yang saling bekerja sama. Walaupun di dalam masing-masing sub komunikasi itu sendiri terdiri dari dua komponen, sebagai berikut: *pertama*, Sub komunitas negara merepresentasikan militer, departemen-departemen, birokrat dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dan yang *kedua*, Sub komunitas modal merepresentasikan investor, perusahaan-perusahaan transnasional dan/atau multinasional, tuan tanah, bahkan tengkulak tingkat kampung masuk kelompok ini.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Op.Cit, Ahmad Wajir. Hal 9

<sup>12</sup> Kata/istilah, kekuatan digunakan oleh penulis sebagai penggabungan dari tiga elemen yang terdapat pada masyarakat yakni, organisasi, tekhnis dan informasi pada masyarakat itu sendiri.

<sup>13</sup>Ibid. Paulo Freire. Hal,59.

Dua kekuatan tersebut, kemudian membuat perencanaan strategi dan taktik untuk melakukan perjuangan yang selalu dijadikan oleh organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah (Ornop/LSM) hanya terfokus pada menghitung dua kekuatan saja, yakni negara dan modal. Seperti terlihat dalam penjelasan skema (Gambar 2).



**Gambar 2.** Tiga kekuatan, yang terbagi dalam kelompok yang selalu bertabrakan dalam kepentingan sosial.<sup>14</sup>

## 2.5. Penyatuan kekuatan, negara, modal dan rakyat

Pada bagaian ini akan dijelaskan pada level-level dimana tiga kekuatan besar yang berhadapan nantinya akan bertemu dengan satu kekuatan, menuju pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana kekuatan negara dan modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terlihat pada kebijakan pemerintah saat ini, dalam merealisasikan anggaran kurang lebih 1 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Dana Desa(DD) sesajak tahun 2015.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dana Desa (DD) merupakan bentuk dari impelentasi kebijakan yang pro-terhadap masyarakat itu sendiri, namun dalam kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bila tidak diorganisir dengan baik maka secara sosiologi akan menimbulkan masalah yang besar dikemudian hari, baik itu mengancam dis-integrasi masyarakat itu sendiri, juga terjadi terhadap negara dan modal.

Maka penting untuk dilakukan penguatan pengorganisasian terhadap masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai problem sosial, dan akhirnya bisa membuat solidaritas masyarakat akan rapuh dengan sendirinya. Anggaran kurang lebih 1 miliar merupakan anggaran yang begitu besar dalam pembangunan desa itu sendiri, maka dalam pengelolaan anggaran tersebut butuh pengorangisasian dengan baik guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama oleh masyarakat desa dan Pemerintah.

## 2.6. Perencanaan kegiatan awal

Setelah komunitas mengenal masalah dan memutuskan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang ada, maka seorang pengorganisir harus sudah mulai mengajak orang-orang untuk melakukan perencanaan kegiatan awal. Jelas, dalam tahap perancangan kegiatan awal ini harus sudah ada komitmen dari orang kampung untuk melakukan perubahan, untuk menyelesaikan solusi yang ada secara berkelompok. Perlu diingat juga bahwa kegiatan awal ini dapat juga digunakan untuk menguji komitmen, baik pengorganisir maupun orang kampung yang terlibat. Maka dalam proses perencanaan awal ada dua hal pokok yang perlu dilakukan yakni, *pertama*, penguatan komunitas dan penyebaran masalah bersama. *Kedua*, proses perencanaan (pembagian tugas dan peran). Perlu ditekankan disini bahwa tahap perencanaan kegiatan awal ini sudah masuk ke dalam kegiatan kelompok, bukan lagi hanya kegiatan pengorganisir semata.

### 2.6.1. Penguatan komunitas dan penyebaran masalah bersama

Setelah melakukan analisa sosial secara bersama-sama, maka mulailah dilakukan penguatan komunitas dengan menjalankan pertemuan-pertemuan rutin dan penyebaran masalah yang sudah lengkap sebab-akibatnya. Pertemuan rutin ini dibantu oleh orang kampung yang telah direkrut sebelumnya. Tujuan dari pertemuan-pertemuan rutin ini adalah menyebarluaskan masalah yang ada untuk membangkitkan kesadaran dan juga mengajak orang kampung sebanyak-banyaknya untuk terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

<sup>14</sup> Op.Cit, Ahmad Wajir. Hal 12.

Dalam proses penguatan komunitas ini, pengorganisir seringkali harus membawakan informasi-informasi atau literatur baru mengenai permasalahan yang dihadapi oleh orang kampung tersebut. Maka dari itu laporan seorang pengorganisir menuliskan laporan seperti dalam contoh berikut ini:

“...untuk membuka wawasan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada, saya mengadakan pertemuan-pertemuan kecil yang tempatnya selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah untuk memberi masukan kepada masyarakat, selain itu saya juga memberikan literatur yang berkenaan dengan permasalahan tersebut”.<sup>15</sup>

Selain itu dalam penguatan komunitas melalui pertemuan rutin ini, pengorganisir sebaiknya dapat meyakinkan orang kampung atau komunitas akan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Seperti dalam penggambaran contoh berikut ini, yang menjelaskan sifat orang kampung yang awalnya takut-takut untuk melaporkan kerusakan atau masalah yang ada.

“.....kampung X makin hari makin asik saja rasa air-sumurnya. Setelah dilakukan analisa bersama, ternyata salah satu penyebabnya adalah pengambilan dan penebangan hutan bakau yang ada disekitar kampung X tersebut, awalnya masyarakat takut dengan enggang untuk melaporkan masalah ini kepada kepala desa (ada kecurigaan bahwa pengambilan pohon bakau ini disetujui oleh kepala desa).” Setelah beberapa kali pertemuan dan dibahas masalah tersebut pada suatu hari, 3 orang dari kampung melaporkan masalah tersebut kepada kepala desa”.<sup>16</sup>

Pemberian contoh tersebut, jelas bahwa penguatan komunitas ini perlu dilakukan pada orang kampung walaupun mereka telah mengetahui duduk perkara dari suatu masalah yang menimpah dirinya dan kampungnya. Tetapi kemauan dan keberanian untuk melakukan sesuatu masih membutuhkan proses. Latihan-latihan ini pun akan dan berguna untuk menimbulkan kembali rasa percaya diri orang kampung yang telah hilang.

### **2.6.2. Proses perencanaan (pembagian tugas dan peran)**

Pada proses ini pengorganisir dan orang kampung yang sudah berkomitmen duduk bersama untuk mencari penyelesaian-penyelesaian yang mungkin terhadap persoalan yang ada. Dalam proses perencanaan tersebut sedapat mungkin pengorganisir membatasi keterlibatannya tidak lebih hanya sebagai fasilitator atau pencatat proses saja. Dan terpenting dalam proses perencanaan tersebut terdapat tiga hal penting yakni, inisiatif kegiatan, kesepakatan aksi bersama, dan latihan aksi (bermain peran). Maka berikut ini akan dijelaskan tiga hal tersebut sebagai berikut:

### **2.6.3. Inisiatif kegiatan**

Inisiatif kegiatan merupakan bagian penting dalam analisis sosial, dimana untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat kebanyakan hampir selalu datang dari pengorganisir, hal ini terjadi karena adanya ketidaksabaran dari pengorganisir dalam menjalankan prosesnya, dimana orang kampung membutuhkan waktu untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya. Inisiatif kegiatan yang diusulkan oleh orang kampung akan sangat terpengaruh oleh proses sebelumnya, yaitu proses analisis sosial. Jika proses analisis sosial masih mengandung kelemahan-kelemahan, maka inisiatif kegiatan pun akan sangat dangkal.

Dalam proses perencanaan, jika memasukkan beberapa inisiatif kegiatan atau aksi, maka tugas pengorganisir hanya membantu orang kampung dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan dan mendukung kepada kegiatan yang diusulkan tersebut. Pada intinya pengorganisir berkewajiban mengajak dan mendorong orang kampung untuk memikirkan kepastian dan kemampuan yang dimiliki oleh orang kampung, untuk menjalankan aksi tersebut dapat dilihat dari kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh orang kampung tersebut.

### **2.6.4. Kesepakatan aksi bersama**

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana usulan-usulan kegiatan yang telah diterima, diperiksa dan diberi catatan-catatan pertimbangan, maka tindakan selanjutnya adalah menyepakati aksi tersebut. Diusahakan penyepakatan aksi ini berdasarkan kepada pertimbangan yang rasional, bukan

<sup>15</sup> Opt.Cit, Ahmad Wajir. Hal 64

<sup>16</sup> Opt.Cit, Ahmad Wajir. Hal 64-65

kepada sebuah proses, seperti pemilihan suara terbanyak atau politik dagang sapi. Perlu kesabaran pengorganisir untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi, kemudian juga perlu kesabaran pengorganisir untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan orang kampung terhadap prioritas bersama tersebut.

### 2.6.5. Latihan aksi (*Permainan Peran*)

Bermain peran (*role playing*) adalah salah satu bentuk permainan yang sangat sering dipergunakan oleh pengorganisir untuk mempersiapkan komunitas atau orang kampung dalam melakukan aksinya. Dalam proses ini pengorganisir dapat terlihat langsung dan memberikan masukan atau arahan-arahan melalui pertanyaan selama latihan ini dimainkan.

Permainan tersebut sangat menguntungkan dibandingkan dengan metode persiapan lainnya. Dalam proses ini komunitas atau orang kampung dapat secara langsung melakukan apa yang hendak dilakukan pada saat aksi, dimana setiap komunitas dapat langsung memerankan posisinya, melalui tanya jawab dengan wakil-wakil pemerintah atau perusahaan yang dalam hal ini diperankan oleh tokoh-tokoh kampung atau pengorganisir itu sendiri.

### 2.6.6. Implementasi Kegiatan

Tahap ini merupakan sebuah proses dimana sesungguhnya sebuah komunitas, baik masyarakat secara umum atau orang kampung dimana pun berada akan mengalami dan menentukan sebuah proses perubahan. Sebuah proses perjuangan yang akan dilakukan sendiri oleh sebuah komunitas dan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari rakyat tersebut. Hal ini sangat penting karena pengalaman dan pelajaran pertama ini akan juga menentukan gerakan selanjutnya.

Implementasi kegiatan adalah sebuah titik yang sangat menentukan, dimana keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan ini akan mempengaruhi semangat komunitas. Dengan melakukan sebuah aksi, kita akan segera mengetahui tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok kita sendiri atau lawan kita. Bagaimana kelompok kita menghadapi tantangan sesungguhnya yang mungkin akan membuat frustrasi dan juga kita akan segera mengetahui bagaimana penindasan masyarakat tersebut merespon aksi kita.

## III. PENUTUP

Tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar mengorganisir masyarakat selain praktek langsung di lapangan, dalam akhir tulisan ini akan ditulis beberapa pelajaran atau kendala yang telah ada sehingga dapat dijadikan perbandingan pada saat melakukan praktek di lapangan. Maka dari itu, seorang pengorganisir, sering kali merasa kesulitan untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya pada saat pertama kali masuk ke sebuah komunitas. Dalam paradigma pembangunan baru, peran masyarakat diharapkan dapat mengimbangi peran negara maupun swasta. Dalam paradigma lama (konvensional) nilai yang dikembangkan berorientasi produksi dalam pertumbuhan ekonomi, yang dimungkinkan akan mengorbankan kepentingan masyarakat demi mengejar produktifitas secara nasional. Sebaliknya dalam paradigma baru, sistem produksi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat terutama dalam bentuk penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Maka diakhir tulisan ini penulis lebih menekankan, dalam pembangunan partisipatoris, masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Bagaimana masyarakat berperan penting, maka perlu adanya pengorganisasian terhadap masyarakat yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan, agar masyarakat sendiri tau apa masalah yang dihadapi sehingga dapat menyelesaikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wajirdan Triyono Darusman. 2001. *Catatan Pertama, Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat Disimpul Belajar*, Bogor, cetakan pertama, April, Yayasan Pustaka.
- Andini, Nurulitha. 2013. *Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum Kabupaten Sleman*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.24 No.3, Desember.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Sebagai Proses. Surat Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea-bissau*. Terjemahan Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.



- Krisdyatmiko. 2004. *Belajar Bersama Dengan Masyarakat Desa, Pengembangan Kelembagaan Jurusan Ilmu Sosiatri Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Petani*. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Desember.
- MC. Candra, Rusmala, D. 2008. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*, Volume IX, No.2, Yogyakarta, Desember, ISSN: 1411-3821.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syahyuti. 2006. *30 konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan pertanian, Penjelasan Tentang "Konsep, Istilah, Teori, dan Indikator Serta Variabel*, Jakarta, , PT.Bina Periwara.